BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan sebuah fenomena interaksi antar negara yang telah muncul dari masa ke masa. Pada masa pra-modern, Hubungan Internasional mengenal pertukaran perwakilan, diplomasi antar kerajaan dan perang dan damai yang terjadi. Banyak diantara pertanyaan penting dan konsepnya mempunyai akar yang dalam dari sejarah intelektual. Dari saat masa klasik Yunani, sampai ke kerajaan Inggris, dinasti Ming China ke Amerika Modern, pemimpin, penasihat, akademisi juga mahasiswa telah bersinggungan masalah dari perang, perdagangan, budaya dan diplomasi (Cox, 2012:16).

Signifikansi Hubungan Internasional sebagai kajian mandiri sebagai dampak dari perang dunia pertama. Muncul sebuah pembelajaran bahwa interaksi antar negara yang tidak terjalin dengan baik akan beresiko perang yang mengakibatkan hilangnya jutaan nyawa umat manusia. Besarnya kerusakan akibat perang dari salah satu ‘‘era paling berdarah dalam sejarah’’telah menjadi inti dari sejak pertama terbentuk sebagai subjek yang diajarkan setelah 1918 (Cox, 2012:17)

Hubungan Internasional bisa didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan dan interaksi antar negara termasuk aktivitas dan kebijakan dari negara,

organisasi antar negara, organisasi non negara dan *multinational corporations* (MNCs) (Jackson dan Sorensen, 2013:4). Penjelasan Sorensen merupakan definisi luas dari kajian Hubungan Internasional. Masih banyak definisi lainnya, tergantung dari isu yang diangkat, actor yang dipilih dan lain-lain. Contohnya terkait dengan Globalisasi, Hubungan Internasional bisa berarti komunikasi dunia, transportasi dan sistem keuangan, perusahaan global dan kemunculan masyarakat internasional (Brown, 2005:1).

Dari definisi kita bisa melihat bahwa aktor dari hubungan internasional bisa berupa aktor negara atau aktor non negara tergantung dengan isu yang diambil dan atau perspektif yang dipilih. Aktor negara atau bangsa yang merdeka didefinisikan wilayah yang terbatasi dan jelas dengan populasi permanen, di bawah pemerintahan berdaulat yang secara konstitusional terpisah dari pemerintahan-pemerintahan di luar batas negara (Jackson dan Sorensen, 2013: 4). Aktor non negara sendiri terdiri dari kelompok nasionalis, kelompok identitas agama, MNCs, organisasi humaniter dan HAM, organisasi lingkungan dan lain-lain yang bukan merupakan bagian dari integral negara (Wilkinson, 2007:58).

Selain itu aktor non negara termasuk organisasi internasional seperti PBB, IMF, World Bank, dan lain-lain. Terjadi perbedaan pandangan dari apa yang dikenal pandangan realisme dan liberalisme dari organisasi internasional. Realisme memandang bahwa organisasi internasional merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional negara karena tidak adanya kekuasaan di atas negara. Liberalisme sendiri khususnya pluralisme memandang Organisasi Internasional merupakan aktor tersendiri yang terbebas dari pengaruh negara.

Perdebatan atas liberalisme maupun realisme merupakan *great debate* pertama dari Hubungan Internasional. Liberalisme muncul lebih awal atas kesadaran bahwa perang dunia pertama menghadirkan tragedi yang mendalam bagi umat manusia. President AS, Woodrow Wilson pada pidatonya terhadap kongres AS pada Januari 1918, memperkenalkan pandangan liberalisme denga yang terkenal melalui *fourteen points* (Sutch dan Elias, 2007:33). Ia memandang pentingnya sebuah institusi untuk merubah sistem *balance of power* yang mengakibatkan perang dunia pertama. Terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan mempertahankan situasi aman dan perdamaian.

Gejala perang dunia kedua dan terjadinya perang dunia itu sendiri menjadi awal dari kemunculan pemikiran realisme dengan melihat tidak mungkin adanya kekuatan di atas negara. Pada dasarnya setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing atau meminjam istilah Morgenthau yaitu *struggle for power* atau berjuang untuk kekuasaan. Realisme mengkritik Liberalisme internasionalisme karena terlalu utopis dalam melihat setiap negara sebagai bangsa yang cinta perdamaian atau *peace loving nations* (Elias dan Sutch, 2007: 34) .

Baik realisme maupun liberalisme pada dasarnya berbicara hubungan antar aktor. Dalam menganalisa hubungan antar aktor, perlu dilihat apa yang menjadi landasan dalam hubungan yang terjadi apakah itu dari ekonomi, politik, sosial atau budaya. Pola hubungan antar aktor sendiri khususnya negara pada dasarnya ada pada tiga bentuk yaitu persaingan, kerjasama dan konflik.

Pola hubungan antar aktor kemudian menciptakan struktur yang bisa berbentuk pemahaman bersama, norma ataupun struktur kelembagaan seperti sistem keuangan internasional. Hal ini dipakai dalam memahami anarki dalam hubungan internasional diakibatkan dari sifat negara yang berdaulat.

Kajian dalam hubungan internasional ini juga mencakup banyak ilmu atau interdisipliner. Kajian hubungan internasional termasuk pada contohnya politik *balance of power* antar negara, pengaruh struktur ekonomi terhadap level global dan hukum, norma dan etika internasional (Viotti, 2012:1). Perbedaan kajian dan fokus aktor ini menimbulkan fokus yang berbeda-beda dalam memperlajari sebuah fenomena dalam hubungan internasional.

Dinamisnya kajian Hubungan Internasional tidak bisa dilepaskan dari bagaimana fenomena hubungan internasional yang juga dinamis. Bagaimana munculnya kajian Hubungan Internasional dari fenomena perang dunia. Munculnya realisme sebagai respon dari gagalnya idealisme ketika perang dunia kedua terjadi, munculnya teori dependensi akibat kekecewaan negara-negara Amerika Latin terhadap pengaruh AS dan lain-lain. Fenomena yang dinamis ini memperlihatkan bagaimana ke depannya Hubungan Internasional akan tetap dinamis.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama didefinisikan pada situasi dimana tiap aktor setuju untuk berkerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin dihasilkan seorang diri (Zartman, 2010:3). Maka kerjasama internasional didefinisikan

sebagai pola bentuk kerjasama tertentu antara beberapa aktor yang melewati batas negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pandangan umum setiap pihak melakukan kerjasama ialah karena interdependensi (Zartman, 2010:5). Tiap negara butuh bantuan aktif maupun pasif untuk setiap bantuan seperti keamanan, pembentukan aturan, perdagangan internasional dan lain-lain. Negara akan lebih mudah mendapatkan kepentingan nasionalnya tanpa biaya dan resiko yang besar dengan adanya kerjasama dibanding melakukannya secara unilateral.

Kerjasama juga pada dasarnya perilaku tidak egois dengan mengedepankan kebutuhan (*requitement*), reputasi (*reputation*), dan keadilan (*fairness*) (Zartman, 2010:5). Kebutuhan jelas menjadi dasar terjadinya kerjasama sesuai dengan pandangan interdependensi. Harapan akan balasan kerjasama secara positif atau negatif tentu akan membawa pengaruh terhadap berjalannya kerjasama. Reputasi ialah bagaimana salah satu pihak menggambarkan dirinya untuk kemudian saling bertukar penggambaran dengan pihak yang diajak kerjasama. Contoh dari reputasi ialah bagaimana China terhadap negara lain selalu menggambarkan dirinya sebagai negara berkembang sehingga dengan mudah mampu bekerjasama dengan negara-negara berkembang yang lain. Keadilan lebih kepada bagaimana setiap pihak mengharapkan terbentuk norma dan gagasan atas kesetaraan dari kerjasama yang dijalin. Tiga hal diatas mempengaruhi tendensi setiap pihak dalam melakukan kerjasama.

Terjadi perbedaan pada perspektif liberalisme dan realisme dalam melihat kerjasama. Realis lebih melihat pada kerjasama terjadi hanya pada saat adanya

keuntungan dan tidak berkelanjutan. Hal ini terjadi karena fokus realisme ada pada keyakinan realis bahwa setiap pihak ada tendensi untuk curang dan mendapatkan hasil yang lebih banyak dengan curang ketimbang sekedar kerjasama (Zartman, 2010:6).

Liberalis melihat Kerjasama dalam kerangka jangka panjang. Liberalis memandang adanya harapan akan keuntungan atas kerjasama di masa depan. Kerjasama pada kelanjutannya bisa mengikat beberapa pihak pada pola interaksi. Hal ini sangat bergantung pada informasi akan kebutuhan di masa depan. Kerjasama kemudian diinstitusionalisasikan melalui rezim, hukum dan organisasi (Zartman, 2010:7).

Kerjasama terkadang menunjukan pada strategi aktor untuk menyelesaikan isu tertentu, dan terkadang sebagai pola interaksi (Zartman, 2010: 2). Dipandang menyelesaikan isu tertentu, karena kerjasama dihasilkan dari pertemuan strategi antar aktor yang selanjutnya dilihat secara rasional dan memunculkan hasil tertentu. Sebagai pola interaksi atau hubungan, Kerjasama bukan hanya untuk menyelesaikan isu tertentu tapi juga sebagai pola berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini dipandang bahwa dengan adanya pola interaksi, maka masalah bisa diatasi secara lebih cepat dengan kerjasama yang sudah lebih dulu dijalin. Salah satu contohnya ialah aliansi keamanan seperti NATO.

Memahami kerjasama pada level internasional atau antar negara tidaklah semudah memahami pada perspektif individu. Pada level internasional, setiap negara yang berkerjasama seringkali berbeda secara *power* sehingga kerjasama

yang terjadi terkadang dianggap berat sebelah bahkan merugikan. Namun pada dasarnya kerjasama apapun menghasilkan *gain* atau hasil. Hasil yang muncul atau "*gains"* tidak hanya diartikan sebagai keuntungan material, namun juga bisa persepsi akan tujuan ke depan seperti keamanan yang terjamin, status, atau kebebasan di satu pihak dan keberikatan pada aktor lain, dan lain- lain (Zartman, 2010:1)

Kerjasama Internasional sendiri terdiri dari kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara dan kerjasama multilateral ialah lebih dari dua negara.

2.1.2.1 Kerjasama Multilateral

Kerjasama multilateral merujuk pada dua definisi dari kerjasama itu sendiri pada akhirnya membentuk dua konteks. Konteks pertama ialah multilateralisme, Rugie berpendapat bahwa multilateralisme merupakan strategi diplomatik yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengkoordinasi kebijakan di antara mereka (Zartman, 2010: 2).

Multilateral sendiri tanpa adanya 'isme' didefinisikan sebagai taktik atau strategi yang diadopsi negara atau sekelompok negara untuk mengejar tujuan yang dipahami (Zartman, 2010:3). Hal ini terkadang untuk menyelesaikan masalah yang muncul di antara anggota, atau bahkan untuk berkompetisi dengan pihak yang ada di luar grup.

Multilateralisme sendiri sering dikompetisikan dengan konsep *unilateralisme* atau tindakan sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Multilateralisme pada dasarnya memiliki dua sisi pandangan pada aktor yang melakukannya. Bagi *small states* atau negara kecil, multilateralisme sangat diinginkan, karena dianggap sebagai perpanjangan politik luar negeri nya untuk ikut berperan (Zartman, 2010:40). Namun juga sering dianggap sebagai beban yang terkadang tidak terlalu diperlukan oleh negara kecil seperti kewajiban *peacekeeping* dan lain-lain. Bagi negara besar, multilateralisme dianggap penting karena sebagai sarana untuk mempermudah persetujuan kebijakan tertentu, namun juga mempersulit di satu pihak harus meyakinkan negara-negara lain.

Kerjasama Multilateral merupakan campuran dari multilateralisme, unilateralisme dan isolasionisme terkunci bersama dalam hubungan dinamis yang selau berubah di setiap masa (Zartman, 2010:41).

2.1.3 Rezim Internasional

Rezim merupakan salah satu bentuk dari institusi sosial yang berada pada suatu struktur sosial yang secara formal dapat dipertegas dengan adanya susunan organisasi didalamnya. Pada struktur formal, anggota resmi dari rezim internasional adalah negara-negara yang berdaulat, bahkan rezim internasional dapat mempengaruhi perilaku para negara anggotanya dalam menentukan kebijakan dan perilaku yang diambil.

Steven Krasner mendefinisikan rezim sebagai prinsip implisit dan eksplisit, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dimana ekspektasi para aktor bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional (Hasenclever, 2004:9). Dari pernyataan Krasner, bisa diambil empat hal mutlak

yang menjelaskan suatu pengaturan disebut rezim yaitu adanya prinsip, norma, aturan dan proses pengambilan keputusan.

Prinsip ialah anggapan atas *fact, causation* dan *rectitude* dari rezim internasional. Norma sendiri merupakan standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban. Aturan dalam bentuk larangan dan ketentuan secara spesifik berkenaan dengan perilaku. Juga proses pengambilan keputusan sebagai praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama *(collective choices).*

Adanya prinsip dalam rezim bisa diilustrasikan dalam studi kasus rezim proliferasi nuklir.

> Dalam rezim proliferasi nuklir terdapat empat prinsip secara eksplisit yaitu pertama, prinsip yang menghubungkan proliferasi senjata nuklir dengan kemungkinan yang lebih besar terjadinya perang nuklir. Kedua, prinsip yang mengakui kebijakan non-proliferasi nuklir dengan keberlanjutan dan penyebarluasan penggunaan energi atom untuk tujuan damai. Ketiga, prinsip yang menjelaskan adanya hubungan horisontal dan vertikal atau adanya anggapan bahwa dalam jangka panjang proliferasi nuklir bisa dihentikan bila para pemegang nuklir dengan memulai mengurangi senjata nuklirnya. Keempat, prinsip verifikasi (Hassenclever, 2004:9)

Dengan kata lain, prinsip merupakan anggapan awal, fakta yang dipercaya dan tujuan utama dari rezim.

Norma dilihat sebagai panduan negara-negara dari perilaku negara anggota rezim untuk berperilaku tertentu dalam menghasilkan hasil yang diinginkan sesuai dengan prinsip atau anggapan dan tujuan yang dipegang. Aturan yang spesifik memperlihatkan norma dalam anjuran dan larangan yang kongkrit khususnya obligasi ketika adanya anggota yang tidak mengikuti aturan rezim. Prosedur lebih

kepada bagaimana pengaturan struktur pengambilan keputusan dalam merespon fenomena yang terjadi.

Rezim mungkin berubah dari waktu ke waktu atau bervariasi sedemikian rupa setidaknya pada empat aspek: kekuatan, bentuk organisasi, cakupan, dan mode alokasi (Haggard, 1987:496). Kekuatan merujuk pada pertanyaan mengapa sebuah rezim dianggap begitu kuat, atau melemah. Kekuatan sebuah rezim dilihat dari derajat kepatuhan aktor terhadap perintah rezim khususnya ketika kepentingan nasional jangka pendek bersentuhan langsung dengan aturan rezim.

Aspek kedua ialah pada bentuk organisasi, hal ini merujuk pada kerjasama yang kompleks, sehingga membutuhkan struktur organisasi yang *autonomus* (Haggard,1987:497). Selain itu, dimensi lain dari aspek organisasi ada pada prinsip *governing representation*, hal ini khususnya melihat bagaimana struktur dalam pengambilan keputusan berdasarkan *one nation one vote* atau *weighted voting* seperti yang terjadi dalam lembaga *International Monetary Fund* (IMF).

Aspek ketiga berdasarkan *scope* rezim ini berpengaruh pada beberapa bidang. Aspek keempat berkisar pada mekanisme sosial untuk alokasi sumber daya. Bagi rezim yang *market-oriented* alokasi akan bisa sebebas-bebasnya dari pengaruh negara dan mendukung alokasi swasta karena tujuannya pada keuntungan. Sedangkan rezim *authoritative allocation* adalah sebaliknya. Perlunya kontrol langsung dari negara, sehingga *resource* diatur oleh rezim. Hal ini terjadi dalam IMF.

> Dalam ekonomi politik, Rezim secara signifikan bisa mempengaruhi dari distribusi keuntungan dari aktivitas ekonomi dan otonomi ekonomi/politik dari negara individual – khususnya negara besar- mencoba mempengaruhi

> desain dan fungsionalisasi dari institusi untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi, politiknya sendiri. (Gilpin, 2001: 78).

Pengaturan internasional (Rezim) yang mengendalikan urusan ekonomi internasional tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari basis politik yang kuat (Gilpin, 2000:13).

Distribusi keuntungan sendiri pada dasarnya dalam studi ekonomi, tidak akan terjadi jikalau tidak ada keuntungan bersama. Politik ekonomi internasional melihat keuntungan yang didapat adalah relative sesuai *power* yang di milikinya, khususnya dalam rezim.

Kepatuhan terhadap rezim internasional adalah masalah utama. Adalah penting untuk mengerti alasan untuk patuh dan tidak patuh.

> Masalah penegakan ini akan muncul setidaknya jika tidak ada negara yang bersifat otoritas dalam rezim, atau negara-negara seringkali terlalu tinggi menilai keuntungan relative dan otonomi nasional dan juga aksi kolektif yang memungkinkan aktor individual curang dan lain-lain (Gilpin, 2001: 88)

Pembuatan dari rezim internasional yang efektif dan solusinya terhadap masalah kepatuhan membutuhkan kepemipinan internasional yang kuat dan efektivitas dari struktur *international governance* (Gilpin, 2001:97). Hal ini tidak ditampik bahwa butuh *leader* yang mampu mendominasi rezim internasional sehingga terjadi sistem yang stabil. Namun hal ini juga perlu legitimasi dari anggota atas dominasinya dalam rezim.

Sebagai *leader* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, Menurut Kindleberger, cakupan, kedalaman, dan lama dari *great depression* menjadi lebih kacau karena tidak adanya figure *leader* yang melakukan beberapa tugas yang dibutuhkan untuk membuat dunia ekonomi berfungsi kembali (Gilpin, 2001:99).

Secara sederhana fungsi *leader* adalah meminjamkan modal, pembentukan rezim kurs mata uang, koordinasi makro ekonomi, mempertahankan ekonomi pasar dan menjadi penyedia dana pinjaman terakhir (*lender last resort)*

Rezim sendiri terbentuk sesuai dengan bidang yang diatur. Salah satu contohnya ialah rezim ekonomi Internasional yang mengatur perdagangan internasional dan hubungan-hubungan keuangan internasional. Pada konferensi Bretton Woods, rezim ekonomi internasional didirikan untuk mengendalikan perdagangan internasional dan urusan keuangan (Gilpin, 2000:46). Rezim yang dimaksud adalah bukan berbagai institusi yang muncul setelah Konferensi Bretton Woods namun sistem yang berisi prinsip, norma, aturan dan proses pengambilan keputusan yang membentuk World Bank juga IMF baik pembentukan, pelaksanaan maupun pelestarian dari sistem keuangan internasional.

2.1.4 Sistem Keuangan Internasional

Sistem keuangan internasional ialah gabungan dari pasar-pasar, institusi-institusi, hukum-hukum, saham-saham, pengaturan-pengaturan dan lain-lain yang diperjualbelikan, dengan bunga yang ditentukan dan jasa keuangan diproduksi dan disebar ke seluruh dunia (Rose, 2007:3). Tugas utamanya ialah memindahkan dana pinjaman terbatas dari simpanan ke peminjam untuk membeli barang dan jasa dan membuat investasi dalam sarana dan fasilitas baru sehingga ekonomi global bisa tumbuh dan meningkatkan standar hidup nyaman bagi masyarakat.

Sistem keuangan internasional secara spesifik terdiri dari kerangka dari persetujuan legal, institusi baik aktor ekonomi baik formal maupun informal yang

secara bersama menfasilitasi aliran modal keuangan internasional untuk tujuan investasi dan pendanaan perdagangan. Sistem keuangan internasional meliputi instrumen, lembaga, kesepakatan yang menghubungkan mata uang, pasar uang, sekuritas, real estate, dan pasar komoditas dunia. Sistem keuangan internasional bisa dibedakan ke badan-badan teregulasi (bank internasional dan perusahaan asuransi), pengatur, supervisor dan institusi seperti *European Central Bank* dan IMF (http://lexicon.ft.com/Term?term=global-financial-system diakses pada tanggal 30 April 2016).

Sistem keuangan internasional merupakan dampak dari makin terintegrasinya negara-negara khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Situasi keuangan negara semakin rentan akibat hubungan ekonomi yang makin intensif, hal ini menuntut setiap negara berkoordinasi kebijakan keuangan mereka untuk menghindari fluktuasi (Hadiwinata, 2002: 162).

Pengaturan sistem finansial atau keuangan internasional ini dibentuk semenjak berakhirnya perang dunia kedua. Hal ini didasari akan munculnya pandangan bagaimana pengaturan ekonomi begitu vital bagi hubungan ekonomi antar negara. Pandangan ini muncul dari pelajaran akan sejarah yang membuktikan bagaimana kesalahan pengaturan ekonomi berujung pada krisis, khususnya pada 1930 ketika terjadi *Great Depression*.

> Selama terjadinya *Great Depression* pada tahun 1930-an, negara-negara mencoba untuk menopang ekonomi yang menuju kebangkrutannya dengan meningkatkan hambatan dalam perdagangan internasional, mendevaluasi mata uang nya untuk bersaing dalam pasar ekspor dan pelarangan terhadap masyarakat menyimpan mata uang asing. Cara ini nyatanya terbukti *self-defeating* atau merusak diri sendiri. Perdagangan dunia secara tajam jatuh dan lapangan kerja juga standar hidup juga anjlok di banyak negara

(https://www.imf.org/external/about/histcoop.htm/ diakses pada tanggal 6 april 2016)

Maka dari itu pendirian pengaturan akan *global economic governance* khususnya masalah finansial ini untuk memastikan stabilnya kurs mata uang dan berkurangnya hambatan atas perdagangan internasional.

Pengaturan sistem keuangan internasional sendiri dibentuk di Bretton Woods atau dikenal dengan Sistem Bretton Woods. Dalam sistem Bretton Woods juga dibentuk dua lembaga keuangan dunia yaitu IBRD (Sekarang bagian dari World Bank) untuk menawarkan pinjaman jangka panjang untuk rekonstruksi serta pengembangan negara-negara pasca PD II dan IMF yang mempromosikan kerjasama moneter dan keuangan global melalui penawaran pinjaman jangka pendek untuk membantu negara-negara yang mengalami defisit (Helleiner, 2008: 220).

Munculnya IBRD merupakan dampak dari apa yang disebut *embedded liberalism* yang Keynes, ahli ekonomi saat itu, ungkapkan. Kebijakan politik AS saat itu tidak menginginkan kembalinya tatanan ekonomi liberal internasional klasik kembali. Mereka mengharapkan tatanan liberal multilateralisme dengan orientasi domestik untuk melawan pengangguran dan mempromosikan kesejahteraan sosial (Helleiner, 2008:219) *Embedded liberalisme* ini menciptakan sebuah pemahaman berupa prinsip peminjaman internasional pada pembangunan. Penyaluran dana pada pola-pola liberal dengan kerjasama dan *mutual interest*.

Fakta bahwa sistem keuangan internasional merupakan sebuah rezim internasional menjelaskan bagaimana lanjutan dari sistem ini sangat bergantung

pada pengaruh negara khususnya negara-negara besar dalam penegakkannya. Pengaruh negara ini termanifestasikan dalam bentuk ekplisit berupa lembaga keuangan internasional. Saat ini lembaga keuangan internasional yang mendominasi sistem keuangan internasional juga IMF dan *World Bank*.

Sistem keuangan internasional pasca Bretton Woods ini merupakan implementasi dari prinsip liberalisme ekonomi dalam meningkatkan kerjasama ekonomi sehingga mampu mencegah terjadinya perang. IMF bertugas dalam menstabilkan kurs mata uang setelah rezim Bretton Woods untuk *fixed exchange rates* atau kurs mata uang tetap dengan dollar sebagai kurs utama yang disandingkan dengan emas. Setelah tahun 1970, IMF secara resmi mengakhiri sistem Bretton Woods tentang dollar ini dan mulai memberlakukan *flexible exchange rates* dengan kurs mata uang mengambang.

World Bank awalnya didesain untuk membantu perekonomian Eropa pasca perang. Setelah selesai, fokus dari *World Bank* bergeser pada pengurangan kemiskinan dunia ketiga, yang merupakan efek dari munculnya negara-negara merdeka baru setelah runtuhnya kolonialisme. Fokus ini pun melebar dari sekedar pembangunan infrastruktur sebelum tahun 1970 an dan melebar ke pembangunan sosial, ekonomi dan lain-lain setelah tahun 1970. Dalam pola peminjaman, muncullah istilah *Washington Consensus*. Istilah ini menggambarkan pola penyaluran dana pinjaman dengan persyaratan liberalisasi sektor internal negara penerima pinjaman. Sampai saat ini, *Washington Consensus* tidak hanya digunakan dalam sistem keuangan World Bank dan IMF, namun hampir seluruh bank multilateral.

2.2 Kerangka Pemikiran

IMF dan World Bank dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga banyak muncul ketidaktepatan regulasi pinjaman yang berujung pada kegagalan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan internasional. Pinjaman juga dinilai terlalu banyak yang dipakai dalam industri ekstraktif yang mencemari lingkungan ketimbang infrastruktur yang memiliki jangka waktu lama dan berpengaruh pada bergulirnya perekonomian di suatu negara.

Terlalu besarnya dominasi negara-negara barat khususnya AS dalam sistem keuangan internasional juga menciptakan ketidakstabilan. Dominasi dollar AS menjadikan kebijakan *federal reserve* menjadi sangat berpengaruh, dan berimbas pada arus modal yang masuk ke negara-negara berkembang. Kenaikkan suku bunga atau penarikan bantuan likuiditas pada mata uang AS bisa menciptakan perpindahan arus modal yang tidak terprediksi.

Sejalan dengan pandangan Birdsall, peneliti melihat bahwa representasi kekuatan negara berkembang dalam sistem keuangan internasional mampu berperan lebih banyak khususnya dalam topik pengurangan kemiskinan global. Hal ini dilihat pada dasarnya:

1. Tidak semua subjek cocok diterapkan liberalisasi atau *structural adjusment* sebagai kondisi pemberian utang.
2. Negara berkembang menjadi aktor yang lebih mudah dan parah jika terkena krisis akibat belum stabilnya perekonomian.

Peralihan kekuatan ekonomi global ke arah negara berkembang khususnya negara-negara *Emerging Market Economies* menciptakan dinamika baru hubungan internasional. Negara-negara EMEs dinilai sudah mampu untuk berbicara lebih banyak khususnya dalam sistem keuangan internasional karena memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni dengan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan. Hal ini didukung oleh populasi dan luas wilayah.

Beberapa negara EMEs seperti Brazil, China, Russia, India dan Afrika Selatan membentuk kerjasama multilateral BRICS. Negara-negara BRICS ini memiliki identitas yang sama yaitu sebagai negara berkembang namun memiliki kekuatan ekonomi yang tidak merata dan permasalahan bilateral masing-masing anggota.

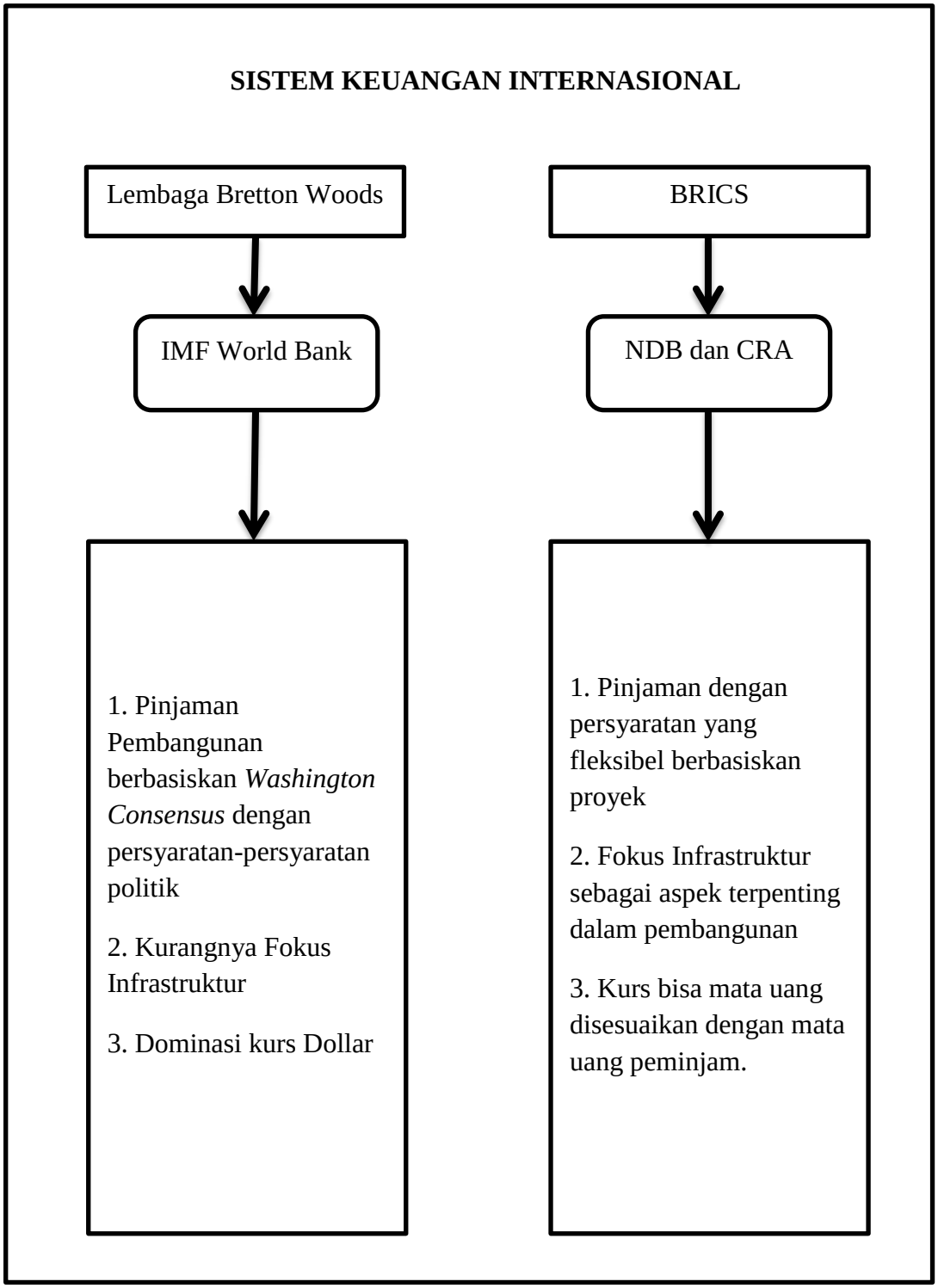
Dalam menyikapi sistem keuangan Internasional, BRICS melakukan kontribusi dengan mendirikan lembaga keuangan internasional baru yaitu Bank BRICS dengan nama *New Development Bank* sebagai memobilisasi sumber daya modal pada proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dalam BRICS dan negara berkembang lainnya dan *Contingent Reserve Arrangement* sebagai dukungan likuiditas untuk negara-negara BRICS. Hal ini bisa disebut kontribusi karena menawarkan prinsip-prinsip berbeda dalam pelaksanaan sistem keuangan sehingga dianggap menjadi alternatif tersendiri. Prinsip-prinsip berbeda itu ialah fleksibilitas dari persyaratan pinjaman, fleksibilitas dari kurs mata uang dan fokus pada infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

Contingent Reserve Arrangement juga menggunakan prinsip yang sama dengan *New Development Bank* yaitu fleksibilitas kurs mata uang dan kondisi

utang. Dengan begitu, CRA bisa menjadi kontribusi khususnya dalam menghadapi *volatility* dari sistem keuangan internasional yang saat ini begitu dipengaruhi dolar.

Dengan sistem yang ditawarkan NDB maupun CRA, BRICS dilihat telah memberikan sebuah kontribusi nyata pada sistem keuangan internasional. Sistem yang ditawarkan merupakan sistem yang ditawarkan sebagai formula pembangunan bagi negara berkembang. Pada akhirnya, sistem keuangan internasional telah mencapai tahap pertama dalam sistem keuangan internasional yang berimbang.

Maka dari itu, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pengaruh NDB dan CRA sebagai kontribusi BRICS dalam sistem keuangan internasional dengan melihat secara prinsip, norma, aturan dan proses pengambilan keputusan. Dengan begitu diharapkan bisa tergambar kontribusi BRICS lebih detail khususnya memperlihatkan sistem keuangan internasional yang lebih berimbang dengan hadirnya NDB dan CRA dalam sistem.



Bagan 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran